



LAPORAN KINERJA 2023

Direktorat Bina Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT BPPHH TAHUN 2023

Disusun dan diterbitkan oleh
Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
©2023

Penerbit mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah menyumbangkan kreativitasnya demi mempercantik tampilan dan tata letak baik berupa Foto, infografis maupun gambar vektor sehingga dokumen LKJ ini memberikan kesan yang mendalam bagi para pembacanya.

Dokumen digital Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat diakses dengan memindai QR code berikut:



<https://bit.ly/LKJ2023-BPPHH>



KATA PENGANTAR

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja juga merupakan amanat pelaksanaan peraturan perundangan tentang pelaporan keuangan dan sistem akuntabilitas kinerja.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2023 menunjukkan bahwa secara keseluruhan target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja dan IKK, dapat tercapai dengan baik dan terdapat capaian yang melebihi target yang ditetapkan.

Pagu anggaran akhir kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2023 sebesar Rp 15.137.355.000 dengan realisasi anggaran sebesar 14.996.619.550 (98,87%). Dengan capaian kinerja sebesar 108,68%, maka pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya input dan output sebesar 0,91.

Dengan demikian, capaian kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2023 termasuk kategori efisien.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pegawai Lingkup Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan yang telah bekerja keras dalam pencapaian kinerja tersebut, serta semua pihak yang turut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan selama tahun 2023. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2023 ini bermanfaat bagi semua pihak

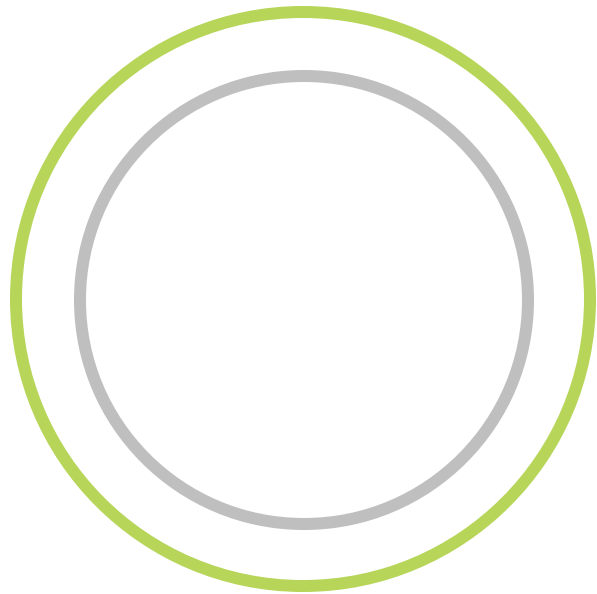
Jakarta, 13 Januari 2024
Direktur BPPHH,



Krisdianto, S.Hut., M.Sc., PhD
NIP. 19731001 199803 1 002



DAFTAR ISI



Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	7
Daftar isi	6

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang	11
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
Isu Strategis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	14
Sumber Daya Manusia	16

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020-2024	21
Perjanjian Kinerja	23
Perhitungan Kinerja	24

BAB III CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja	27
Realisasi Anggaran	45
Perhitungan Efisiensi	48
Capaian Kegiatan Lainnya	49

BAB IV PENUTUP

Penutup	54
---------	----

RINGKASAN

Laporan Kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2022 merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan atas penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020 sampai 2024.

Rencana Strategis Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan disusun untuk mendukung tercapainya sasaran program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan bertanggungjawab pada Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai ekspor produk olahan hasil hutan yang bersertifikat Legalitas Kayu, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan telah menetapkan 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: (1) Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu sebanyak 45 juta m³ dengan capaian Tahun 2023 sebesar 49,55 juta m³; (2) UMKM yang difasilitasi SVLK (sertifikat/penilaian /inventarisasi) sebanyak 100 UMKM dengan capaian tahun 2023 sebanyak 136 UMKM; dan (3) Volume ekspor produk industri kehutanan sebanyak 16,5 juta ton dengan capaian sebanyak 17,21Juta Ton.

Dalam pencapaian IKK tersebut Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dihadapkan pada beberapa permasalahan dan tantangan yaitu kepastian ketersediaan bahan baku untuk pengolahan hasil hutan, dinamisnya permintaan pasar ekspor kayu olahan, serta lemahnya pemahaman dan manfaat SVLK di tingkat UMKM.

Adapun strategi dan langkah-langkah yang ditempuh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan untuk menjawab persoalan dan tantangan antara lain :

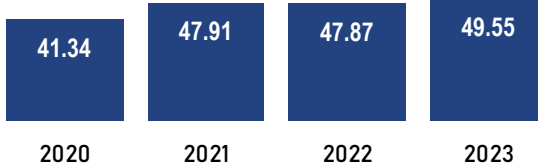
1. Peningkatan pemantauan pelaporan pemenuhan baku dan realisasi produksi, serta melakukan evaluasi kinerja PBPBH;
2. Meningkatkan koordinasi multi stakeholder (sektor hulu-hilir dan pasar);
3. Mendorong relaksasi regulasi untuk penambahan luas penampang, koordinasi antar kementerian/lembaga terkait penyelesaian masalah ekspor, sosialisasi bimbingan teknis kepada eksportir dan importir, serta melakukan promosi dan kerjasama perdangan produk kayu legal ditingkat Internasional.
4. Bekerjasama dengan stakeholder melakukan sosialisasi SVLK ditingkat tapak, fasilitasi SVLK bagi UMKM dan promosi/perluasan akses pasar produk ber-SLK.

Pagu anggaran akhir kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2023 sebesar Rp 15.137.355.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.996.619.550 (98,87%). Dengan capaian kinerja sebesar 108,68%, maka pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya input dan output sebesar 0,91 atau efisien.

Meningkatnya Produktivitas Pengolahan Hasil Hutan



Realisasi per tahun



49,55
Juta m³

Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK tahun 2023.

Capaian 106,38% dari target 45 juta m³

Meningkatnya Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan Bersertifikat LK

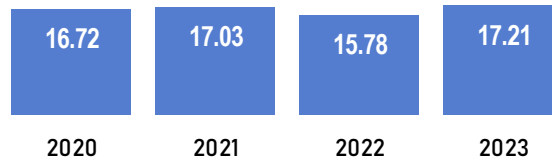
17,21
Juta ton

Ekspor produk olahan hasil hutan tahun 2022,

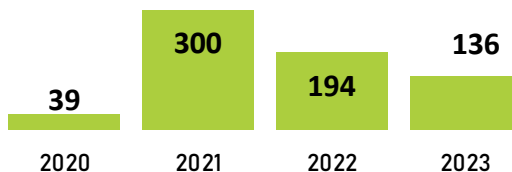
Capaian 104,30% dari target 16,5 juta ton



Realisasi per tahun



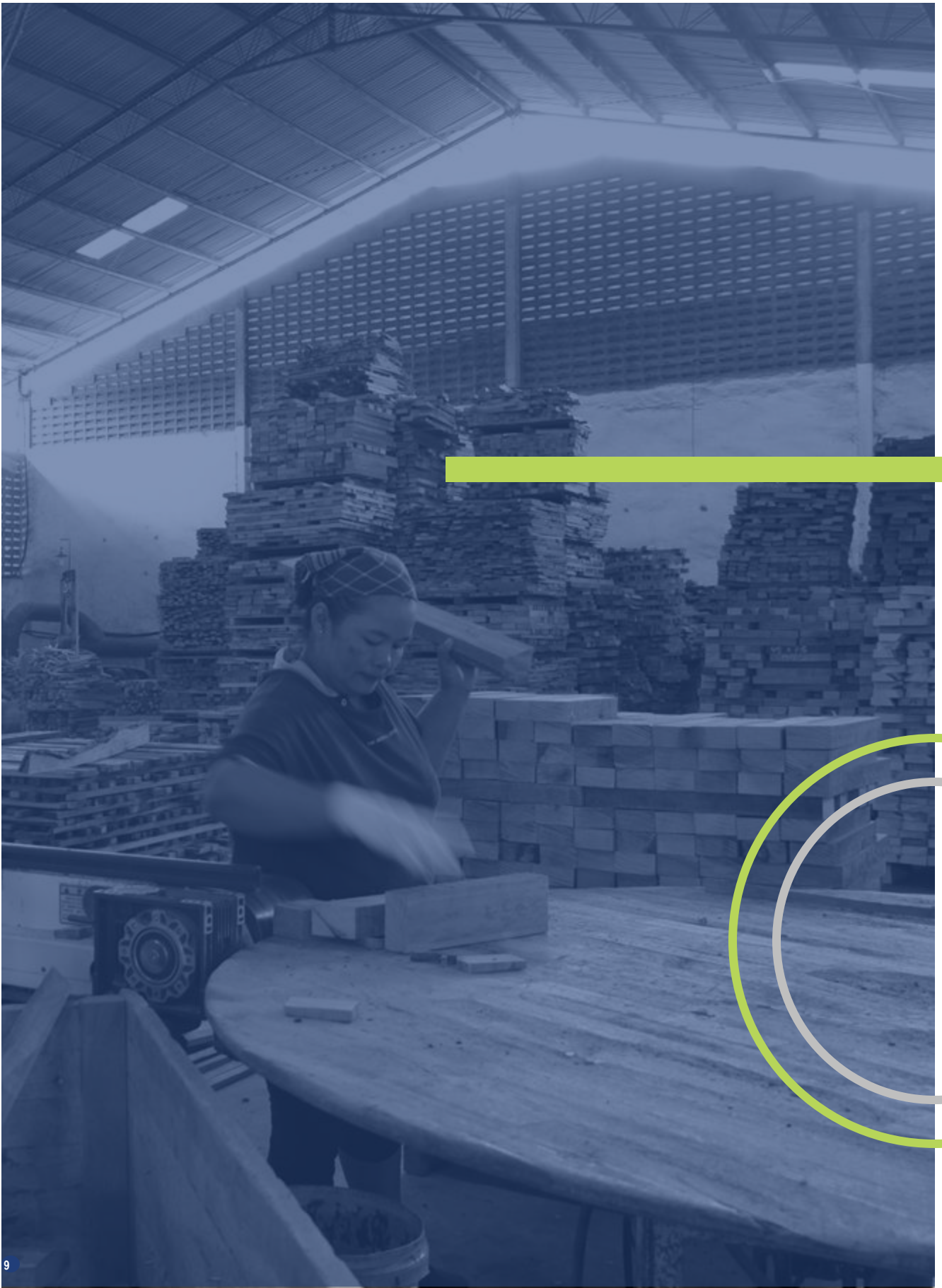
Realisasi per tahun



136
UMKM

UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK

Capaian 120% dari target 100 UMKM



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang	11
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
Isu Strategis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	14
Sumber Daya Manusia	16

LATAR BELAKANG

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja tersebut disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, serta untuk memenuhi prinsip akuntabilitas.



TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (Direktorat BPPHH) merupakan salah satu unit kerja Eselon II yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan lestari.

Direktorat BPPHH memiliki tugas **Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pengolahan dan pemasaran hasil hutan.** Sedangkan fungsi Direktorat BPPHH adalah :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku
3. pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan
4. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan;



6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat

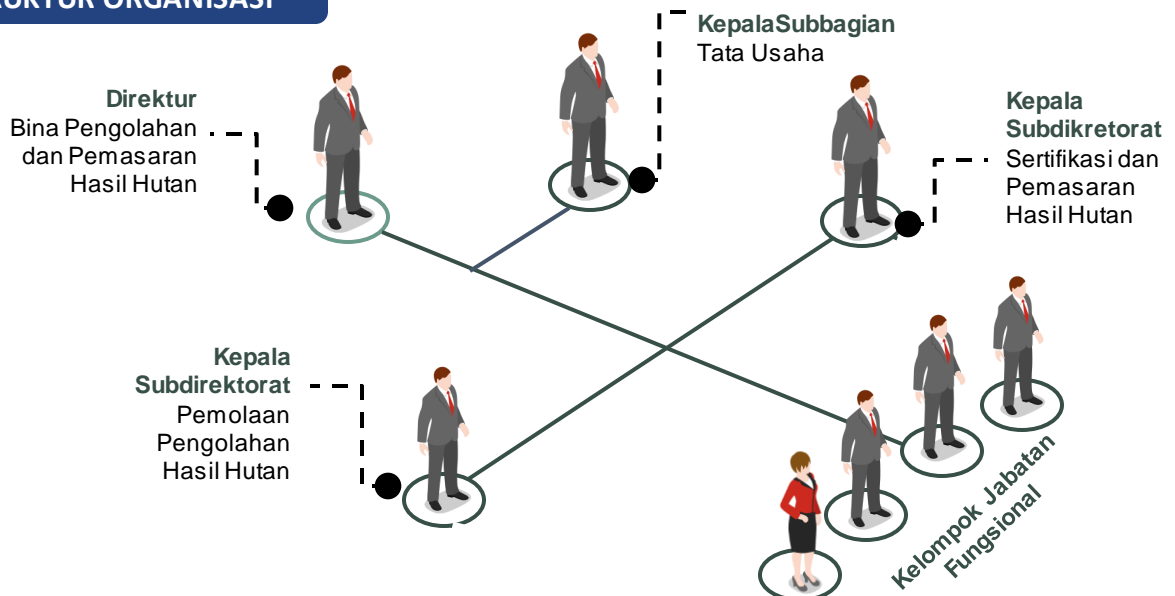
Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas : (i) Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan; (ii) Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan; Sub bagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan pengolahan hasil hutan memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja pengolahan hasil hutan dan kemitraan.

Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang sertifikasi, pemasaran dan kerjasama pemasaran produk pengolahan hasil hutan serta notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan.

STRUKTUR ORGANISASI



ISU- ISU STRATEGIS

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

1. Ketidakpastian Pasar Global

Ketidakpastian perekonomian global terhadap industri pengolahan hasil hutan dan ekspor kayu olahan akibat adanya . hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya permintaan ekspor kayu olahan dan berujung pada menurunnya produksi kayu olahan. Sementara pasar produk industri pengolahan kayu di dalam negeri juga cukup berat, karena harus bersaing dengan produk-produk substitusi seperti logam, plastik, keramik dan lainnya. Ini menjadi tantangan bagi Direktorat untuk menciptakan regulasi yang dapat memudahkan pelaku usaha menghadapi ketidakpastian pasar global tersebut.



2. EU Deforestation Regulation (EUDR)



Setelah EUDR, muncul tren Deforestation Free Regulation pada pasar-pasar kunci, diantaranya U.S. Forest Act 2023, UK Forest Risk Commodities, dan Japan Clean Wood Act (revised). SVLK yang telah memenuhi aspek legalitas pada EUTR/FLEGT VPA, perlu beberapa penyesuaian agar memenuhi EUDR dan regulasi sejenis, diantaranya: perbaikan kriteria dan indikator, interkoneksi sistem untuk memperkuat keterlacakan implementasi geo-lokasi (SIPUHH, SIPASHUT, SIRPBBI & SILK), dan pendekatan joint audit voluntary-mandatory. Penguatan SVLK dimaksud, sambil melanjutkan upaya-upaya yang selama ini dilakukan, yaitu: diplomasi, kerjasama internasional, promosi, dan penguatan pasar domestik.

3. Industri Pengolahan Hasil Hutan berbahan baku Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 Ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Tanaman yang umum ditanam oleh masyarakat umum kayu ringan (*softwood*). Pada tahun 2023 tercatat sebesar 14 % bahan baku industri PBPHH berbahan baku kayu dari hutan rakyat. Hal tersebut menandakan semakin berkembangnya industri pengolahan yang menggunakan bahan baku hutan rakyat.

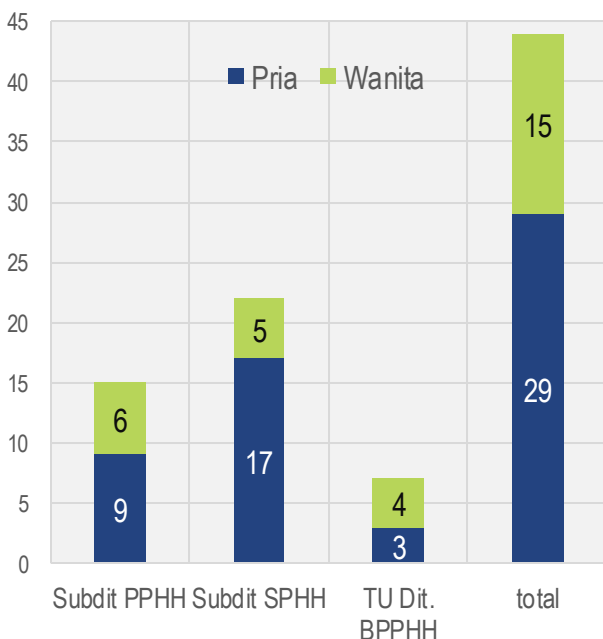


SUMBER DAYA MANUSIA

Direktorat Bina Pengolahan dan pemasaran Hasil Hutan memiliki jumlah sebanyak 44 Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional. SDM tersebut terdiri dari 15 orang pegawai di satuan kerja (Satker) Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, 22 orang pegawai di satuan kerja (satker) Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan dan 7 orang pegawai di satuan kerja (satker) Tata Usaha Direktorat BPPHH.

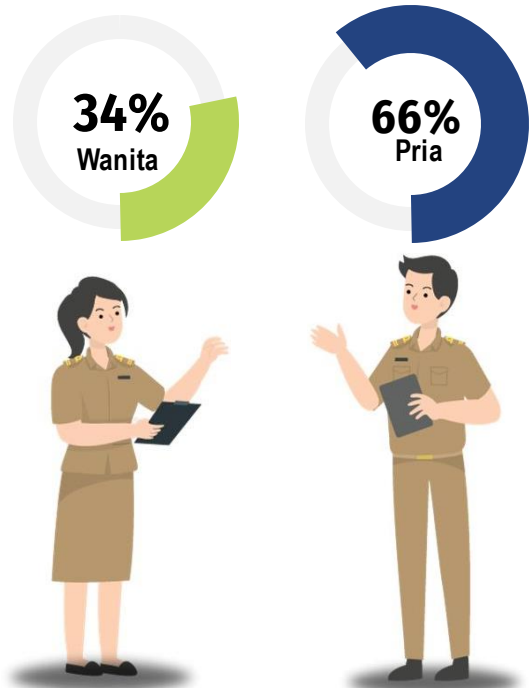
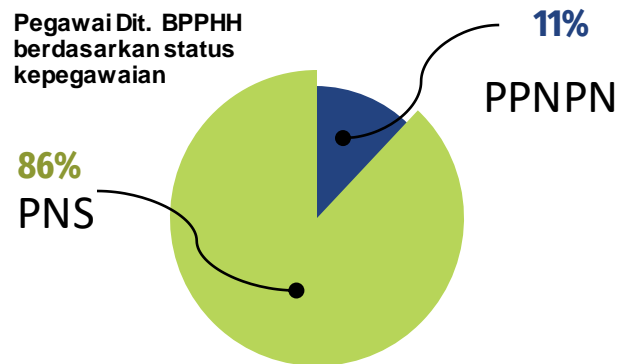
SDM yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sejumlah 39 orang pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sejumlah 5 orang pegawai. Pegawai di Dit. BPPH masih didominasi oleh Pria sebanyak 66% dan sisanya merupakan pegawai Wanita sebanyak 34%.

Jumlah Pegawai Dit. BPPHH berdasarkan Jenis Kelamin Per Subdirektorat



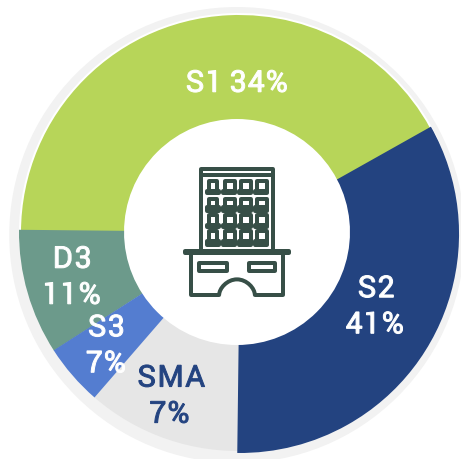
44

Total Pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan



SDM Direktorat BPPHH siap Mendukung Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Unggul dan BER-AKHLAK

Tingkat Pendidikan Pegawai Dit. BPPH

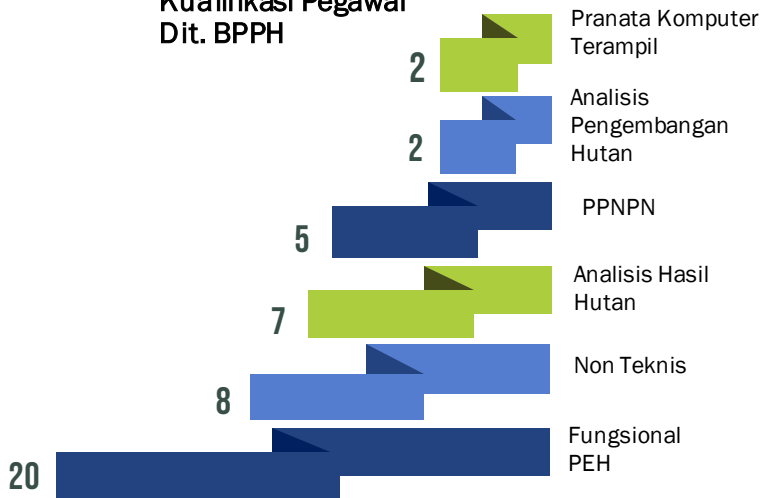


Kualitas SDM tidak lepas dari tingkat Pendidikan. Pada Direktorat BPPHH mayoritas memiliki Pendidikan S1 sebanyak 15 orang atau 34%, kemudian S2 sebanyak 18 orang atau 41%, D3 sebanyak 5 orang atau 11 %, SMA sebanyak 3 orang atau 7% dan S3 sebanyak 3 orang atau 7%.

Kualifikasi pegawai yang dimiliki Satker mempengaruhi fokus kegiatan yang dikembangkan pada satker. Pada Direktorat BPPHH mayoritas terdiri dari kualifikasi Fungsional PEH sebanyak 20 orang, Non Teknis 8 orang, Analisis Hasil Hutan 7 orang, PPNN 5 orang, Pranata Komputer Terampil 2 orang dan Analisis Pengembangan Hutan 2 orang.

Bedasarkan kelas usia menunjukkan paling banyak pegawai di Dit. BPPHH berada di rentang umur 41-50 sebesar 36,4% atau 16 orang. Kemudian tidak jauh berbeda dengan rentang umur 31-40 sebesar 34,1% atau 15 orang. Lalu rentang umur 51-60 sebesar 22,7% atau 10 orang dan yang paling sedikit

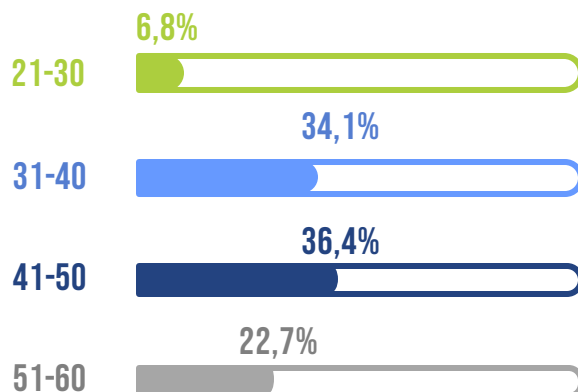
Kualifikasi Pegawai Dit. BPPH



jumlah orang pada rentang umur 21-30 sebesar 6,8% atau 3 orang.

Melihat angka-angka tersebut, Direktorat BPPHH menghadapi tantangan dari sisi SDM mengingat baik pada tahun 2023 dan 2024 tercatat akan ada 6 SDM yang menghadapi purnatugas. Guna mengisi kekosongan akibat adanya purnatugas Direktorat BPPH perlu didukung dengan regenerasi melalui rekrutmen/penambahan pegawai baru yang kompeten sesuai bidang.

Kelas Usia Pegawai Dit BPPHH

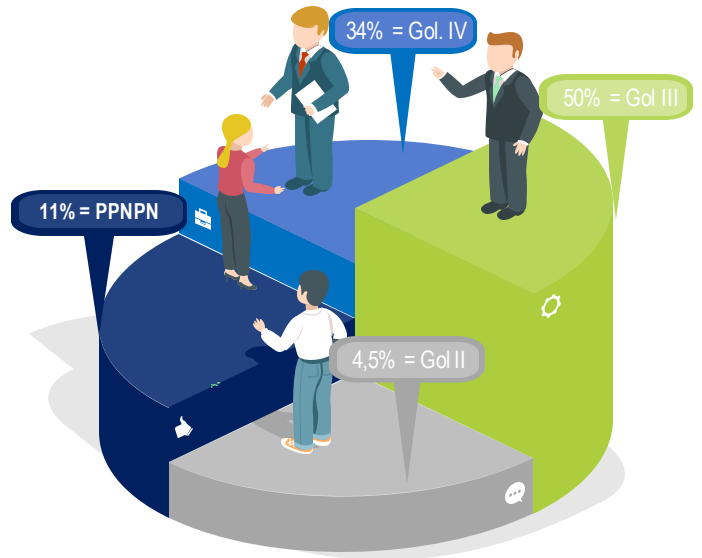


Bedasarkan Golongan, kelompok tertinggi berasal dari golongan III sebesar 50% atau 22 orang, kemudian disusul golongan IV sebesar 34% atau 15 orang, Lalu honor sebesar 11 % atau 5 orang, dan paling rendah pada golongan II sebesar 5% atau 2 orang.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat, pada tahun 2023 Direktorat BPPHH melakukan peningkatan kapasitas kepada SDM diantaranya :

1. Uji kompetensi terhadap pegawai fungsional
2. Pelatihan *softskills* dan penguatan kompetensi teknis sesuai bidang

Golongan Pegawai Dit. BPPHH



Potret Sumber Daya Manusia Dit. BPPHH





Personil
Subdirektorat
Pemolaan
Pengolahan Hasil
Hutan



Personil
Subdirektorat
Sertifikasi
Sertifikasi dan
Pemasaran Hasil
Hutan



Personil
Subbagian Tata
Usaha Direktorat
BPPHH



Sehingga, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan bertanggungjawab atas Kegiatan Peningkatan Usaha Industri



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020-2024	21
Perjanjian Kinerja	23
Perhitungan Kinerja	24

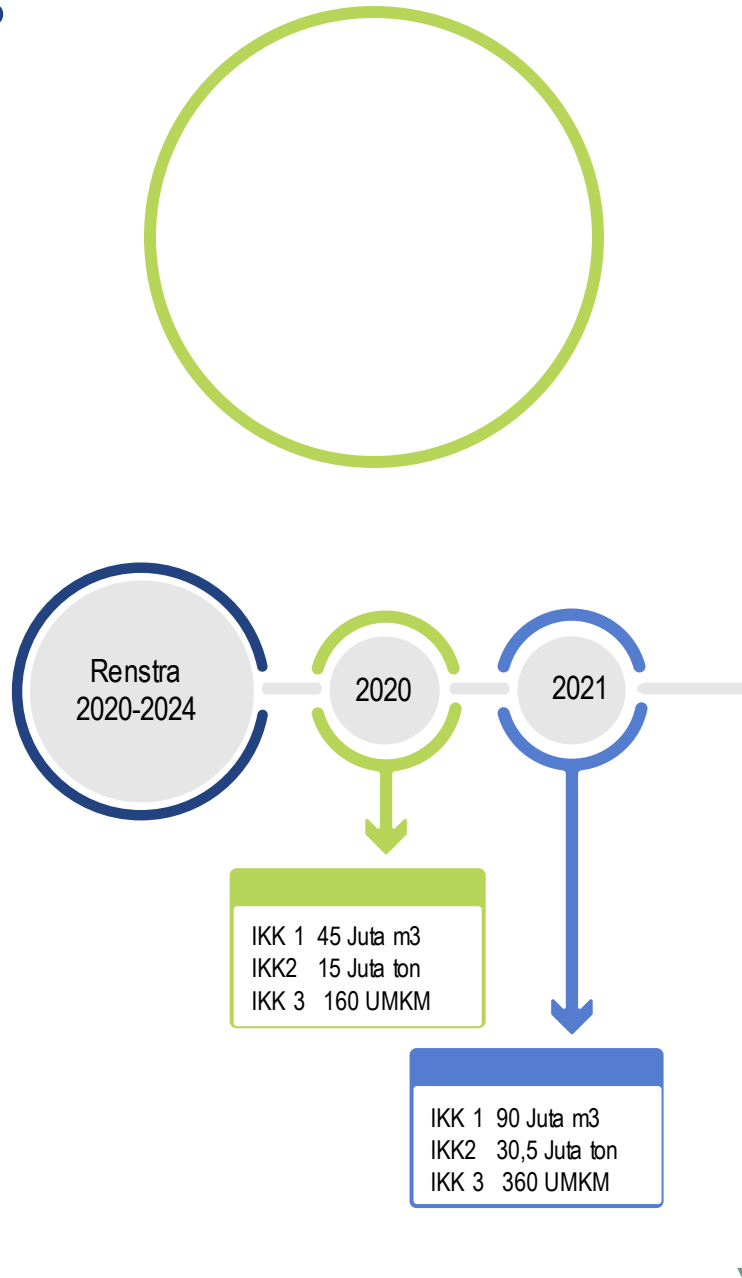


RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, Ditjen PHL melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk mencapai Visi Ditjen PHL yaitu “Terwujudnya tata kelola hutan produksi berkelanjutan berbasis multiusaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”..

Adapun sasaran program yang akan dicapai adalah sebagai berikut: (1) Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan; (2)Meningkatnya produksi kayu bulat; (3) Meningkatnya nilai ekspor produk hasil hutan; (4) Meningkatnya PNPB dari Pemanfaatan Hutan. (5) Meningkatnya pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.



- IKK 1**
Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu (Juta M3)
- IKK 2**
Ekspor Produksi Olahan Hasil Hutan (juta ton)
- IKK 3**
UMKM yang difasilitasi sertifikasi penilikan SVLK (UMKM)



Sebagai parameter keberhasilan dalam pencapaian sasaran, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024, adalah :

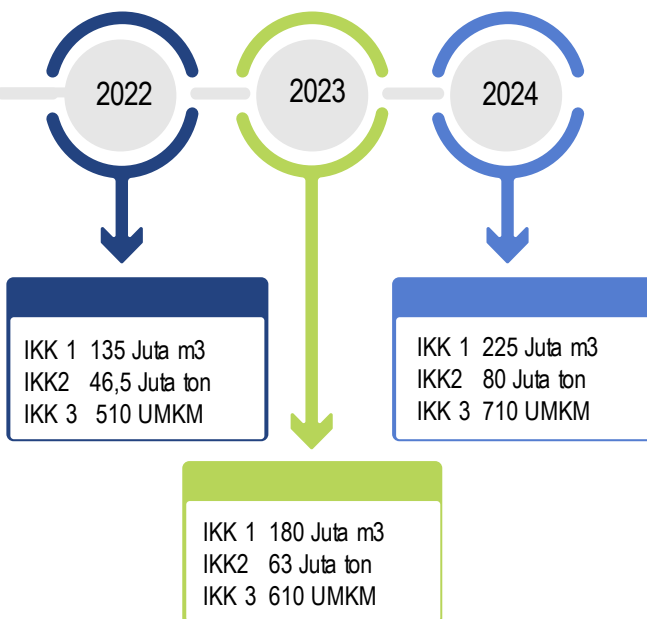
1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan 1.972.000 Hektar selama 5 Tahun;
2. Jumlah produksi kayu bulat, 269 Juta m³ setiap tahun;

3. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan sebesar 49 Milyar USD
4. Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan sebesar 16.028 Triliun Rupiah
5. Luas Pemanfaatan Hutan berbasis masyarakat sebesar 45.000 Hektar

Sehingga, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan bertanggungjawab atas Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan untuk mendukung tercapainya Sasaran Program **“Meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan”**.

Indikator kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan berkontribusi dalam pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, yaitu IKP 4 **“Ekspor produk industri kehutanan meningkat sebesar US\$10,5 miliar pada tahun 2024”**

Untuk mencapai target IKP tersebut, maka Direktorat melalui Kegiatan Peningkatan Industri Kehutanan, menurunkan menjadi 3 (tiga) Indikatot Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024 sebagaimana ditampilkan pada ilustrasi disamping



PERJANJIAN KERJA DAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dengan Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menargetkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2023 sebagaimana ditampilkan pada ilustrasi dibawah

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan memperhatikan rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman pada Renstra. Renja tersebut memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.



Dokumen
Perjanjian Kinerja
Dit BPPHH Tahun 2023
bit.ly/PK2023-BPPHH



Dokumen Renja
Dit BPPHH Tahun 2023
bit.ly/Renja2023-BPPHH

IKK 1

Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu (Juta M3)

Target
45 Juta m3

IKK 2

Ekspor Produksi Olahan Hasil Hutan (juta ton)

Target
16,5 juta Ton

IKK 3

UMKM yang difasilitasi sertifikasi penilikan SVLK (UMKM)

Target
100 UMKM

PERHITUNGAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dengan metoda:

1. Perbandingan realisasi dan target;
2. Perbandingan realisasi dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya lalu;
3. Perbandingan realisasi dengan standar.

Metoda pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2023 adalah **metoda perbandingan realisasi dengan target tahun 2021** dan **metode perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target kumulatif sampai dengan tahun 2024**.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, pelaksanaan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula **analisis efisiensi** dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis itu menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.



$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Capaian Output}}$$

Sebagai catatan, apabila angka efisiensi kurang dari angka 1 berarti EFISIEN atau menunjukkan penggunaan anggaran yang efektif untuk memenuhi sasaran.



BAB III

CAPAIAN

KINERJA

Capaian Kinerja	27
Realisasi Anggaran	45
Perhitungan Efisiensi	48
Capaian Kegiatan Lainnya	49



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



IKK 1

Target 45,00 Juta m3
Capaian 45,79 Juta m3



IKK 2

Target 16,5 Juta m3
Capaian 17,21 Juta m3



IKK 3

Target 100 UMKM
Capaian 136 UMKM



Pengukuran capaian kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi pada masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Hasil pengukuran kinerja tersebut, semua target kinerja pada Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan. Realisasi IKK 1 volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu sebesar 106,38%, Realisasi Pengukuran kinerja pada Capaian kinerja masing-masing IKK disajikan pada ilustrasi berikut. Realisasi IKK 2 ekspor produk olahan hasil hutan sebesar 104,30% dan Realisasi IKK 3 UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK sebesar 125%.

Perbandingan Capaian IKK Dengan Target Renstra Tahun 2020-2024

Menapaki tahun ke-4 pelaksanaan Renstra 2020-2024, Kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) IKK sebagaimana ditampilkan pada tabel disamping, menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh telah melebihi angka 50 persen dengan rata-rata sebesar 86 persen

Kinerja tersebut yang telah dicapai tersebut mendukung program pengelolaan hutan lestari melalui peningkatan produktivitas pengolahan hasil hutan dan peningkatan ekspor produk olahan hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu.

IKK	2020	
	Target	Capaian
IKK 01. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu (Juta m ³)	45	41,34 (91,87%)
IKK 02. Ekspor produk olahan hasil hutan kayu (Juta Ton)	15	16,72 (111,47%)
IKK 03. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK (UMKM)	160	39 (24,38%)

Sampai dengan tahun 2023, IKK 1 telah tercapai sebesar 182,91 juta m3 atau 81,29% dari target Renstra sebesar 225 juta m3. Sedangkan IKK 2 telah tercapai sebesar 80 juta ton atau 83,43% dari target Renstra sebesar 80 juta ton. IKK 3 telah tercapai sebesar 660 UMKM atau 94,23% dari target Renstra sebanyak 710 UMKM.

Pada pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024 terdapat dinamika yang cukup tinggi mengingat pada tahun 2020-2021 Indonesia berjuang melawan Pandemi Covid-19 dan adanya dampak gejolak Global akibat Perang Rusia dan Ukraina. Direktorat BPPHH terus berupaya untuk dapat tetap menjaga kinerja sesuai dengan target akhir Renstra 2020-2024 yang telah ditetapkan. Upaya pencapaian tiap IKK lebih detail sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya.




2021		2022		2023		Periode 2020 - 2024	
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
90	89,25 (99,17%)	135	137,12 (101,57%)	180	182,91 (101,62%)	225	182,91 (81,29%)
35,5	33,75 (95,07%)	46,5	49,53 (106,52%)	63	66,74 (105,94%)	80	66,74 (83,43%)
360	339 (94,17%)	510	533 (104,51%)	610	669 (109,67%)	710	669 (94,23%)

IKK 01.

VOLUME PRODUKSI KAYU OLAHAN YANG BERSERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Peningkatan Kinerja pengolahan hasil hutan kayu merupakan salah satu upaya mendorong kebijakan hilirisasi industri dalam rangka mendukung pengembangan dan investasi pengolahan hasil hutan dalam negeri.

IKHTISAR CAPAIAN

- Target 45 juta m³
- Capaian 49,55 juta m³
- % Realisasi 110,11%
- YOY  3,51%
- Capaian Renstra 82,96%



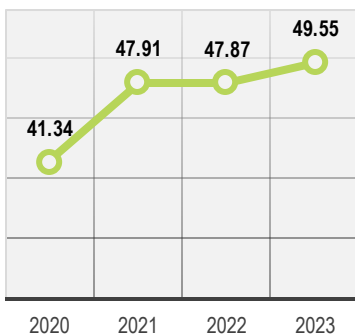
Peningkatan Kinerja pengolahan hasil hutan kayu merupakan

Peningkatan Kinerja pengolahan hasil hutan kayu merupakan salah satu upaya mendorong kebijakan dalam rangka mendukung pengembangan dan investasi pengolahan hasil hutan. Hal ini didukung dengan peningkatan produktivitas pengolahan hasil hutan kayu untuk industri kayu gergajian, plywood, veneer, pulp dan serpih kayu yang digunakan sebagai Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Volume Produksi Kayu Olahan yang bersertifikat Legalitas Kayu.

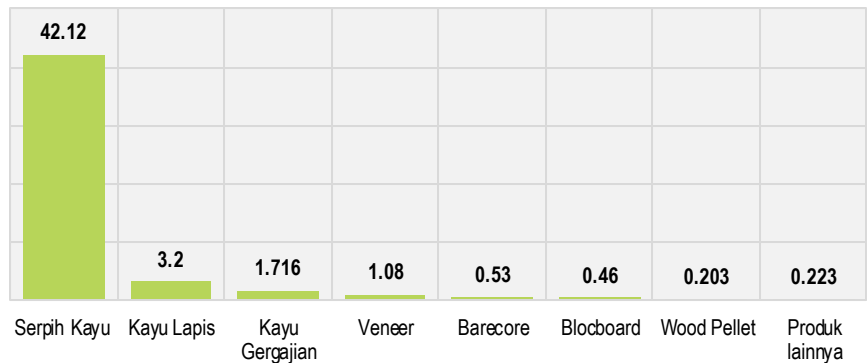
IKK Volume Produksi Kayu Olahan yang bersertifikat Legalitas Kayu merupakan jumlah kayu olahan (dalam meter kubik) bersertifikat SVLK yang diproduksi oleh Industri Pengolahan Hasil Hutan pemilik Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH).

Data capaian kinerja Volume Produksi Kayu Olahan yang bersertifikat Legalitas Kayu diperoleh dari Sistem Informasi Rencana Pengolahan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan (SI-RPBBPHH).

Tren Volume Kayu Olahan Per Tahun (juta m³)



Volume Kayu Olahan Per Ragam Produk (juta m³) Tahun 2023



SI-RPBBPHH merupakan system informasi untuk Penyampaian Rencana Kerja Operasional Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan dan Penyampaian Laporan Bulanan Relisasi Kinerja Pengolahan Hasil Hutan oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan.

Pada tahun 2023, realisasi capaian volume produksi kayu olahan sebesar 49,55 juta m³, atau 106,38 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Angka tersebut meningkat 3,50% dibandingkan capaian produksi tahun 2022 sebesar 47,87 juta m³.

Tren volume produksi kayu olahan Bersertifikat Legalitas Kayu mengalami peningkatan sejak tahun 2020, meskipun terjadi penurunan pada Tahun 2022. Peningkatan produksi pada Tahun 2023 utamanya berasal dari produk serpih kayu yang berbahan .

Apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu sebesar 180 juta, maka capaian volume produksi kayu olahan secara kumulatif tahun 2020-2023 sebesar 186,67 juta m³ atau 103,71 % dari target.

Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Direktorat dalam membina Industri pengolahan hasil hutan untuk terus berkinerja dan turut mendukung percepatan perizinan berusaha untuk mendorong tumbuhnya industri baru.

Jumlah produksi kayu olahan sampai dengan periode Desember 2023 adalah 49,55 juta m³ dengan rincian, sebagaimana tabel berikut:

Produk	Produksi 2023 (m3)	Produksi 2022 (m3)
Kayu Lapis	3.200.772	3.822.988
Veneer	1.088.401	1.260.755
Kayu Gergajian	1.716.328	1.796.573
Serpil Kayu	42.126.589	39.703.708
Blockboard	461.281	398.170
Bare Core	531.562	614.600
Wood Pellet	203.821	122.164
JUMLAH	49.552.440	47.874.622

Produksi kayu olahan didominasi oleh ragam produk serpil kayu (chips) yang hampir 85% dari total produksi. Produksi serpil kayu terus menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar global terhadap produk kertas dan kemasan yang lebih ramah lingkungan, serta dukungan bahan baku kayu bulat produksi hari hutan tanaman yang terus meningkat.

Strategi pencapaian IKK 1 diantaranya :

1. mendorong PBPHH yang melebihi kapasitas produksi untuk mengajukan perluasan atau rekomposisi ragam produk agar meningkatkan peluang peningkatan produksi; dan
2. meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pemantauan produksi kayu olahan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Balai Pengelolaan Hutan Produksi.

Kegiatan yang dilakukan terkait pencapaian IKK adalah sebagai berikut:

1. melakukan pemantauan laporan realisasi RKOPHH dan produksi menjadikan bagian kegiatan pengendalian risiko dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
2. memberikan toleransi 30% dari kapasitas produksi kepada PBPHH yang akan melampaui kapasitas produksinya; dan pada tahun 2023 terdapat sebanyak **14** PBPHH yang memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal PHL;
3. evaluasi kinerja PBPHH melalui kegiatan bimbingan teknis PBPHH untuk mendorong tertib pelaporan realisasi RKOPHH dan produk;
4. mendorong PBPHH yang melebihi kapasitas produksi untuk mengajukan perluasan atau rekomposisi ragam produk agar meningkatkan peluang peningkatan produksi; dan
5. meningkatkan koordinasi dengan BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi.

Kendala dalam pencapaian IKK, yaitu:

1. Pasar utama produk pengolahan hasil hutan adalah untuk ekspor, sehingga Dinamisnya permintaan pasar ekspor untuk produk kayu olahan.
2. Kesulitan memperoleh dan akses terhadap sumber bahan baku terutama untuk bahan baku dari hutan alam;
3. Ketidaktepatan pelaporan dan kualitas SDM pelaporan pada Unit manajemen yang masih rendah;

Indikator Kinerja Kegiatan 1 Volume Produksi Kayu Olahan yang bersertifikat Legalitas Kayu, pelaksanaan indicator ini didukung oleh 4 (empat) Rincian Ouput (RO) dengan uraian target dan realisasi sebagaimana table berikut.

Berdasarkan Capaian IKK sebesar 110,11 % dan Realisasi Anggaran sebesar 98,99 maka diperoleh pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,89, sehingga masuk kategori Efisien.

Tabel Capaian Output Kegiatan Pendukung IKK 1 Tahun 2023

Kode Output	Uraian	Satuan	RINCIAN OUTPUT			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	(%)	PAGU	Realisasi	(%)
AFA.001	NSPK Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	NSPK	1	1	100	223.310.000	222.327.176	99,56
PBV.001	Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	Rekomendasi Kebijakan	1	1	101,62	348.956.000	344.691.510	98,78
QAH.001	Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Besar	Layanan	37	41	110,81	537.168.000	535.830.185	98,75
QDH.001	Pembinaan Teknis/Supervisi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Lembaga	160	160	106,67	1.206.419.000	1.189.535.401	98,60
Total						2.315.583.000	2.292.384.272	98,99

PERHITUNGAN EFISIENSI IKK 1

$$\frac{\%realisasi\ anggaran\ (input)}{\%capaian\ output\ (output)} = \frac{98,99\%}{110,11\%} = 0,89$$

“Efisien”



IKK 02.

EKSPOR PRODUKSI KAYU OLAHAN

Peningkatan ekspor produk kayu olahan sebagai sumber devisa negara dari sektor kehutanan.

IKHTISAR CAPAIAN

- Target 16,50 juta ton
- Capaian 17,21 juta ton
- % Realisasi 104,30%
- YOY 30%
- Capaian Renstra 45 juta m³

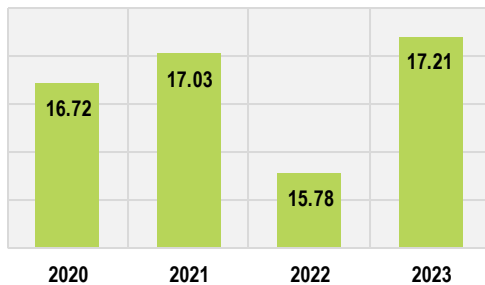


Indikator Kinerja Kegiatan 2 ekspor produksi kayu olahan merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan ekspor produk kehutanan sebagai sumber devisa negara melalui kegiatan ekspor produk kehutanan. Target IKK ekspor produk kehutanan tahun 2023 adalah volume ekspor sebesar 16.5 Juta ton atau 0,5 Juta ton lebih tinggi dari target sebelumnya sebesar 16 Juta Ton.

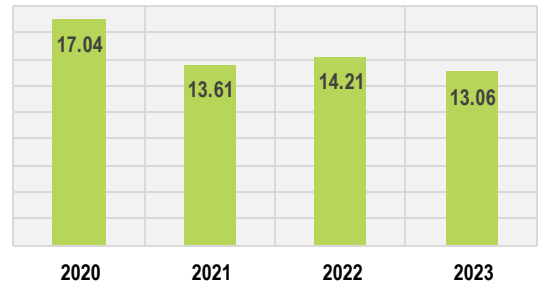
Volume ekspor produk kehutanan adalah salah satu data/informasi utama yang terdapat dalam

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang merupakan dokumen yang bersifat wajib untuk ekspor produk industri kehutanan. Adapun satuan yang digunakan yaitu kilogram yang dapat dikonversi menjadi satuan volume lainnya (ton). Satuan ini merupakan satuan yang wajib diisi di Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan berlaku untuk semua jenis produk ekspor industri kehutanan.

Tren Volume Ekspor Kayu Olahan (Juta ton)



Tren Nilai Ekspor Produk Kayu Olahan (M USD)



Capaian kinerja IKK 2 ekspor produk kayu olahan pada tahun 2023 sebesar 17.21 juta ton atau 104.3 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, capaian volume ekspor produk kayu olahan secara tonase mengalami kenaikan sebesar 4.33% dimana capaian pada tahun 2022 sebesar 15.78 juta ton . Namun secara nilai ekspor produk hasil hutan pada tahun 2023 (dalam USD) mengalami penurunan sebesar 4.22% dari capaian pada tahun 2022.

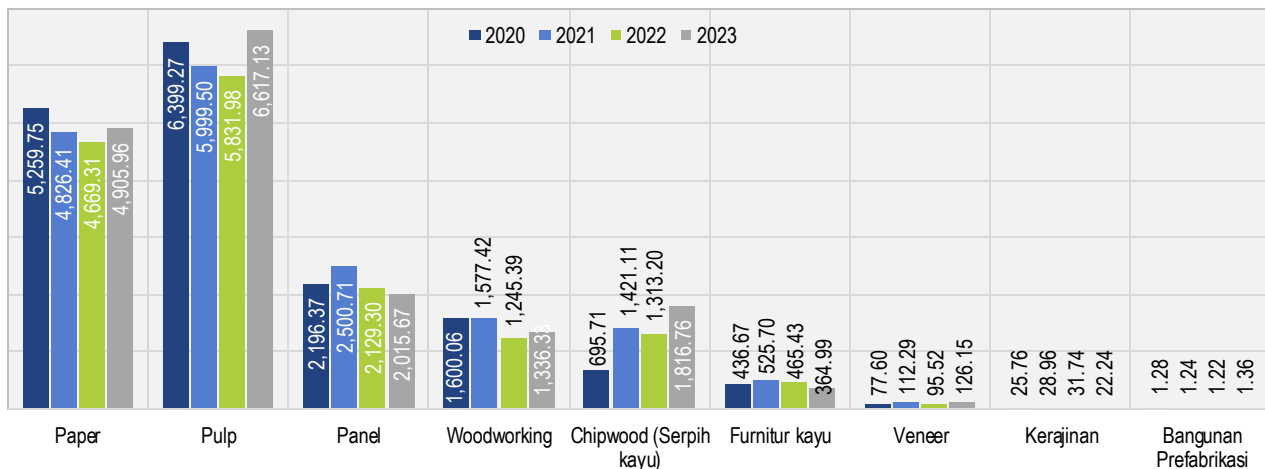
Apabila dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2024 sebesar 80 juta ton, volume

ekspor produk hasil hutan telah terealisasi sebesar 66.74 juta ton sepanjang 2020 sd. 2023 atau sebesar 83.43% dari target.

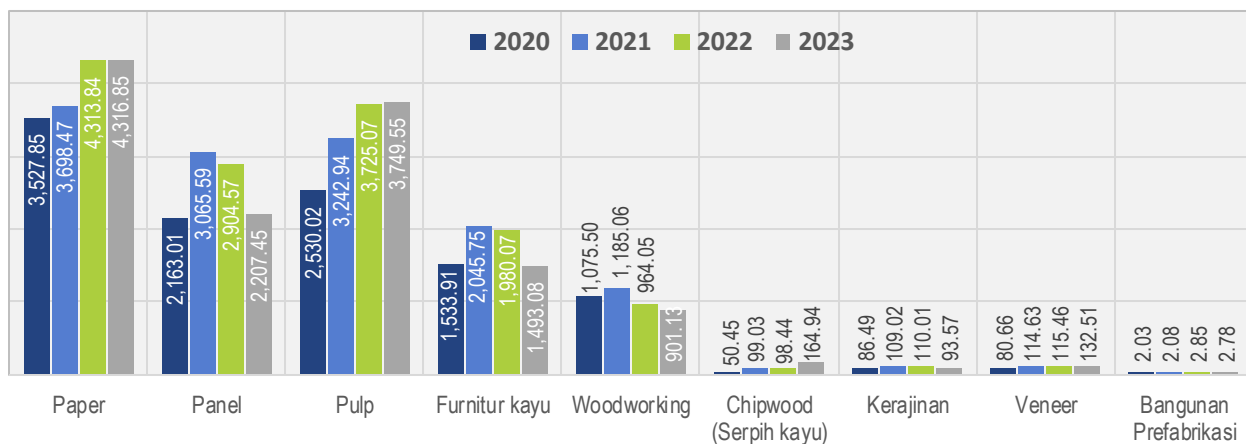
Volume kayu ekspor kayu olahan mengalami kenaikan pada tahun 2023, namun secara nilai mengalami penurunan, sebagaimana ditampilkan pada ilustrasi disamping.

Tahun 2023 Nilai ekspor produk kayu olahan mengalami penurunan beberapa hal yang menjadi penyebabnya antara lain disebabkan oleh penurunan kinerja usaha dikarena lesunya permintaan pasar dunia selain itu terjadinya penurunan harga di tingkat internasional

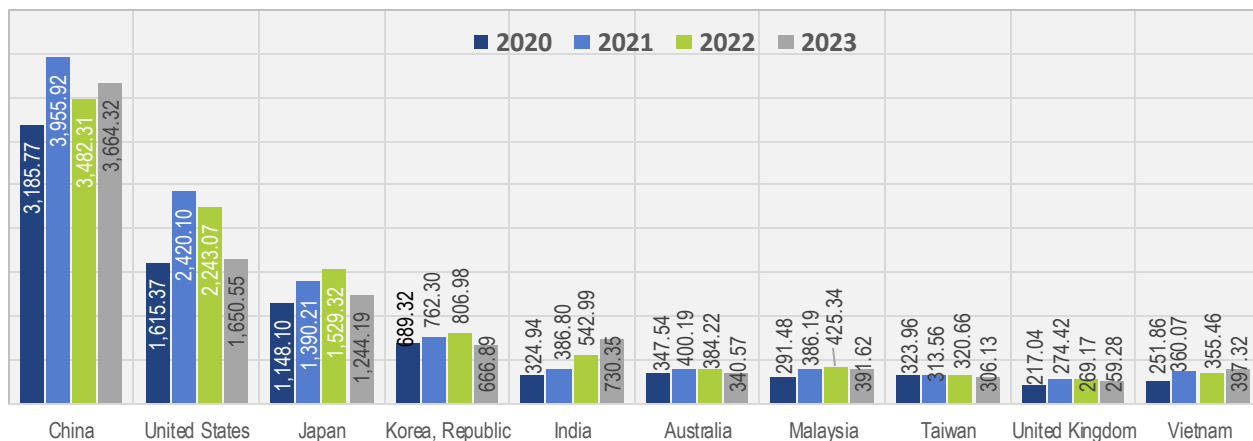
Tren Volume Ekspor Produk kehutanan per kelompok jenis produk dari 2020-2023 (x1.000Ton)



Tren Nilai Ekspor Produk kehutanan per kelompok jenis produk dari 2020-2023 (x 1.000.000 USD)



Perkembangan Nilai Ekspor ke 10 Besar Negara Tujuan (MUSD)



Dari tabel di samping terlihat bahwa selama periode 2020 – 2023, produk pulp memiliki volume ekspor tertinggi dibandingkan ragam produk lainnya. Tingginya volume ekspor pulp dibanding kertas juga menunjukkan bahwa pasar global lebih banyak membutuhkan bahan setengah jadi dalam bentuk pulp.

Sedangkan berdasarkan table disamping, dari segi nilai, produk kertas memiliki nilai tambah yang lebih besar dibandingkan pulp dan juga ragam produk lainnya. Hal ini dibuktikan dengan nilai ekspor kertas yang tertinggi selama 3 tahun berturut-turut.

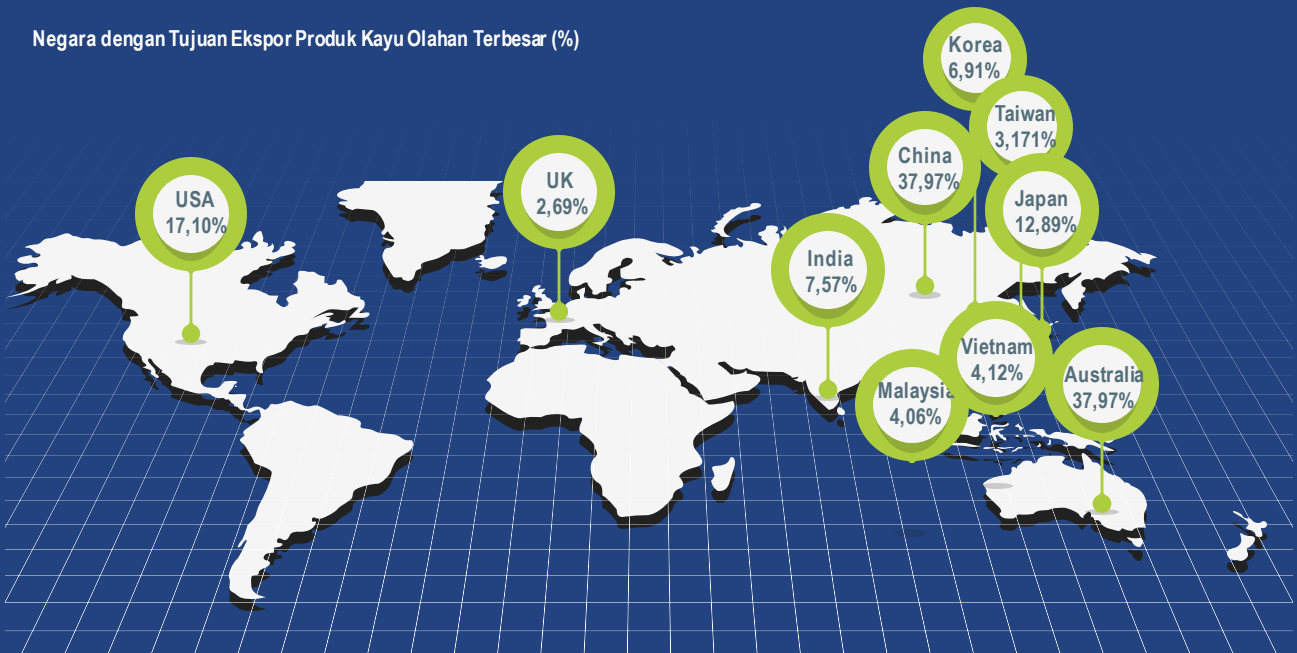
Pasar ekspor produk industri kehutanan masih didominasi oleh negara-negara di kawasan Asia sebesar 65,64% dari nilai ekspornya dan 83,90% dari volume ekspornya.

Selama 4 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Negara tujuan ekspor yang tertinggi adalah



negara Cina. Pada tahun 2023 saja total ekspor kayu olahan ke Cina mencapai 38%. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya permintaan produk industri kehutanan ke negara tersebut berupa pulp. Negara lain Selain Cina, Amerika Serikat, Jepang dan Korea masih menjadi negara tujuan ekspor produk kayu olahan terbesar.

Negara dengan Tujuan Ekspor Produk Kayu Olahan Terbesar (%)



Nilai ekspor produk industri kehutanan adalah salah satu data/informasi utama yang terdapat dalam Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk melihat kinerja ekspor. Nilai ekspor ini untuk ekspor produk industri kehutanan menjadi sangat penting karena bisa saja 1 jenis produk yang sama beratnya tapi jenis/species kayunya atau nilai artistik lebih tinggi maka kedua produk tersebut nilai ekspornya akan berbeda. Untuk ekspor produk industri kehutanan pada umumnya nilai ekspornya semakin meningkat untuk produk semakin hilir, end-use atau bernilai seni tinggi.

Satuan yang digunakan yaitu US dollar yang berlaku untuk semua jenis produk ekspor industri kehutanan.

Berdasarkan data dari SILK tanggal 31

Desember 2023 yang diunduh pada 5 Januari 2024, data dan informasi terkait ekspor produk industri kehutanan menggunakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa dibandingkan tahun 2022, volume ekspor tahun 2023 mengalami peningkatan 7.35 % sedangkan nilai ekspor mengalami kenaikan 4,45%. Hal ini diduga karena jenis produk yang di ekspor memiliki berat/volume yang kecil namun, memiliki nilai yang tinggi.

Kenaikan nilai ekspor juga tidak sejalan dengan produksi kayu bulat dikarenakan bahan baku yang digunakan tidak hanya berasal dari kayu bulat tetapi juga dari industry lanjutan, serta bahan baku juga berasal dari impor.

URAIAN	SATUAN	2021	2022	2023
Jumlah Shipment (Jumlah Dokumen V-Legal yang diterbitkan)	Dokumen	240.366	222.546	219.701
Jumlah Negara Tujuan Eksport	Negara	190	185	197
Jumlah Negara Tujuan Eksport Anggota Uni Eropa	Negara	28	27	28
Jumlah pos tarif (Kode HS - 4 digit)	HS	45	47	46
Jumlah Pelabuhan Asal/Muat (Seluruh Indonesia)	-	66	69	63
Jumlah pelabuhan bongkar (seluruh negara tujuan ekspor)	-	2.162	2.240	2.290
Berat Bersih	Kg	17.036.598.596	15.783.516.287	17.206.572.294
Nilai	US\$	13.608.242.262	14.214.365.921	13.061.839.822

Strategi yang ditempuh untuk mencapai IKK ini terutama di Tahun 2023 melalui :

1. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait penyelesaian masalah yang ditemui eksportir;
2. Sosialisasi/Workshop dan bimbingan teknis kepada eksportir dan importir, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Ikut berpartisipasi dalam pertemuan lokal atau internasional dalam skema kerjasama perdagangan untuk mempromosikan SVLK dan perdagangan produk kayu legal dll.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai IKK antara lain :

1. Demand permintaan ekspor produk-produk olahan hasil hutan menurun pada tahun 2022.
2. Sebagian negara tujuan ekspor menghentikan ekspor ke Cina (adanya *lockdown*), serta negara-negara Eropa dan Amerika sebagai dampak perang Rusia dan Ukraina.
3. Adanya persoalan di negara tujuan ekspor menyebabkan menumpuknya stock di gudang industri dalam negeri.
4. Buyer membatalkan impornya sehingga timbul renegosiasi kontrak.

5. Kelangkaan angkutan/kapal yang menyebabkan nilai transportasi tinggi yang berakibat banyaknya stock.

Upaya tindak lanjut :

1. Perlunya upaya-upaya untuk kesamaan/keselarasan visi dan misi antar kementerian/lembaga terhadap SVLK dan ekspor produk kayu legal.
2. Meningkatkan kapabilitas eksportir untuk menghasilkan produk ekspor berkualitas, mengikuti selera pasar dan mampu bersaing dengan negara eksportir lainnya.
3. Perlunya penyampaian informasi dan regulasi update secara kontinu terutama kepada eksportir mikro-kecil yang sering mengalami kendala terutama saat ekspor ke Uni Eropa akibat kurangnya informasi/kesadaran untuk pelaksanaan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan IKK 2 didukung oleh 1 (satu) Rincian Output dengan uraian target dan realisasi capaian sebagaimana tabel dibawah. Berdasarkan Capaian IKK 2 sebesar 104,30 % dan Realisasi Anggaran sebesar 99,41 maka diperoleh pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,95 sehingga masuk kategori Efisien.

Dukungan Rincian Output pada IKK 2

Uraian	Satuan	RINCIAN OUTPUT			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	(%)	PAGU	Realisasi	(%)
6733.BAC.001 Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	Badan Usaha	370	376	101,6	7.105.110.000	7.063.430.440	99,41

PERHITUNGAN EFISIENSI IKK 2

$$\frac{\%realisasi\ anggaran\ (input)}{\%capaian\ output\ (output)} = \frac{99,41\%}{104,30\%} = 0,95$$

“Efisien”



BENCHMARKING EKSPOR PRODUK HASIL HUTAN

Global Timber Index

Global Timber Index (GTI) adalah sistem indeks yang secara komprehensif mencerminkan tren keseluruhan produksi dan perdagangan kayu global. GTI report diolah dari data yang disediakan oleh *timber enterprises* pada negara-negara pilot. GTI disusun oleh *Global Green Supply Chains Initiative (GGSC)* yang didukung oleh ITTO.

Berdasarkan kajian Global Timber Index (GTI) Platform di beberapa negara, terlihat bahwa Indonesia lebih baik dibanding beberapa negara sample lainnya.

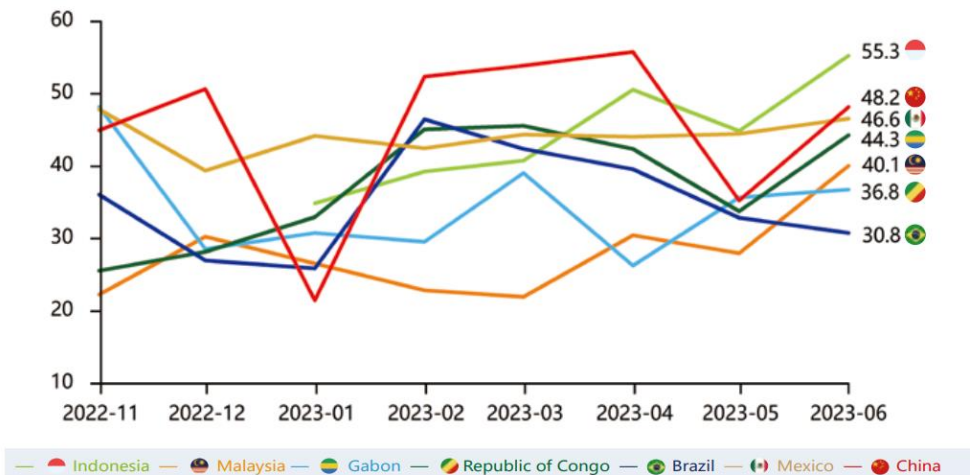
Indeks GTI Indonesia (55,3) paling tinggi dibanding beberapa negara sample lainnya (China 48,2; Mexico 46,6; Gabon 44,3; Malaysia 40,1; Congo 36,8; Brazil 30,8).



GTI-Indonesia sub-index

Overview of the GTI Index

Signs of Stabilization and Recovery of Indonesia's Timber Market in Spite of Insufficient International Orders



IKK 03.

UMKM YANG DIFASILITASI SVLK

Peningkatan produksi dan pemasaran melalui fasilitasi SVLK, pengadaan barang sera penerbitan dokumen V-legal atau Lisensi FLEG-T bagi usaha mikro, kecil, dan/atau menengah tujuan dalam negeri dan ekspor.

IKHTISAR CAPAIAN

- Target 100 UMKM
- Capaian 136 UMKM
- % Realisasi 136,00%
- YOY  29,89%
- Capaian Renstra 94,23%

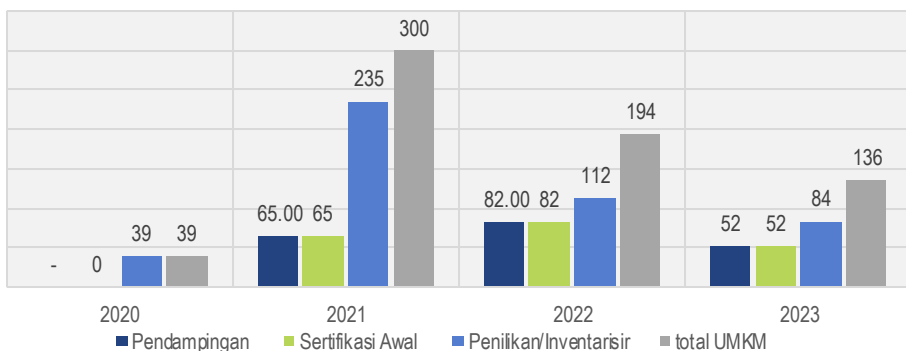


*Peningkatan Kinerja
pengolahan hasil hutan
kayu merupakan*

Sertifikasi/Penilikan Legalitas Kayu merupakan salah satu komponen pada kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan, yang memiliki sub komponen Sertifikasi Legalitas Kayu Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kehutanan. Lingkup pelaksanaan SVLK dilakukan dari hulu ke hilir meliputi pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan

Non Kehutanan, pemilik Hutan Hak, tempat penampungan hasil Hutan, pemegang PBPHH, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri, serta eksportir. Kegiatan sertifikasi/Penilikan dilaksanakan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang telah diakreditasi oleh Komite Kreditasi Nasional (KAN) dan telah ditetapkan oleh Kementerian LHK sebagai LPVI.

Tren Capaian UMKM 2020-2023



669 UMKM

Total UMKM yang telah difasilitasi sd. 2023



Untuk pelaksanaan verifikasi legalitas kayu, LPVI berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 251 bahwa Kementerian dapat memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan/atau menengah tujuan dalam negeri dan ekspor dalam upaya peningkatan produksi dan pemasaran diantaranya fasilitasi SVLK dan

pengadaan barang serta penerbitan Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT

Kegiatan fasilitasi SVLK bagi UMKM berupa pembiayaan sertifikasi baru dan penilikan yang hanya diberikan kepada pelaku usaha skala kecil dan menengah dalam bentuk kelompok atau perorangan. Untuk kegiatan sertifikasi baru dialokasikan di Direktorat BPPHH, sedangkan kegiatan penilikan dialokasikan di setiap Balai Pengelolaan Hutan Lestari guna pendekatan pelayanan terhadap UMKM.

Alur Usulan Fasilitas :

- 1** Dit BPPHH bersurat kepada LPVI dan Dinas terkait usulan fasilitas
- 2** LPVI dan Dinas terkait menyampaikan data usulan
- 3** Fasilitas UMKM dilaksanakan berdasarkan skala prioritas ruang lingkup, kapasitas dan tujuan pemasaran

Pada tahun 2023, jumlah UMKM yang difasilitasi SVLK (sertifikasi awal/penilikan) sebanyak 136 UMKM, atau 136 % dari target yang ditetapkan (100 UMKM). Capaian tersebut terdiri dari 52 UMKM di Direktorat BPPHH dan 84 UMKM yang tersebar di wilayah Balai Pengelolaan Hutan Lestari. Capaian per Balai dapat dilihat pada table disamping.

Prosentase capaian tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022, namun hal ini masih relevan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yang lebih rendah dari tahun 2022.

Capaian IKK tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebanyak 710 UMKM, maka capaian UMKM yang telah difasilitasi secara kumulatif tahun 2020-2022 telah mencapai 94.23% dari target.

UMKM di luar Jawa cenderung tidak berminat mendapat fasilitas daripada di luar Jawa : bisa dihubungkan dengan fakta sebelumnya : "nilai ekspor yg tinggi sementara produksi kayu bulat hutan alam rendah, justifikasi terkait dg capaian ekspor yg di sebabkan oleh meningkatkan ekspor produk olahan kayu rakyat..". Fakta lapangan menunjukkan di luar Jawa tidak berminat karena : (1) hanya memasok pasar dalam negeri, dan (2) fakta bahwa BPPHH kesulitan mendapat pasokan bahan baku dari hulu yang berSVLK,

kecenderungan dari PAHT atau kayu alam yang tumbuh alami; (3). Keberhasilan hutan tanaman dan hasil budidaya di luar Jawa belum mampu mensupport BPPHH umkm. (4) Sehingga UmKM di luar Jawa akan kesulitan pemenuhan persyaratan mendapat sertifikat SVLK.

No	Unit Kerja	Jumlah Fasilitas	
		Target	Realisasi
1	Direktorat BPPHH	25	52
2	BPHL Wilayah I Banda Aceh	1	1
3	BPHL Wilayah II Medan	1	1
4	BPHL Wilayah III Pekanbaru	1	2
5	BPHL Wilayah IV Jambi	1	1
6	BPHL Wilayah V Palembang	1	2
7	BPHL Wilayah VI Bandar Lampung	10	10
8	BPHL Wilayah VII Surabaya	42	42
9	BPHL Wilayah VIII Pontianak	1	1
10	BPHL Wilayah IX Banjarbaru	4	6
11	BPHL Wilayah X Palangkaraya	1	2
12	BPHL Wilayah XI Samarinda	4	7
13	BPHL Wilayah XII Palu	4	4
14	BPHL Wilayah XIII Makassar	1	2
15	BPHL Wilayah XIV Ambon	1	1
16	BPHL Wilayah XV Jayapura	1	1
17	BPHL Wilayah XVI Manokwari	1	1
TOTAL		100	136

Kelembagaan hutan rakyat di Pulau Jawa sudah tertata sehingga rantai pasok terjamin. Tanpa intervensi pemerintah petani bersedia menanam/berinvestasi menanam pohon, PBPHH umkm memandang pasokan bahan baku yang relatif berkelanjutan dapat menjamin usahanya, pasar dalam negeri/eskpor pun melihat ada produksi yang continue sehingga pasar terbuka untuk hasil produksi PBPHH umkm tsb. Rantai pasokan ini mengalir terus

Dalam pelaksanaan Fasilitasi SVLK bagi UMKM terdapat beberapa kendala yaitu :

1. Pemahaman UMKM terhadap SVLK masih minim, sehingga belum mengerti maksud dan tujuan akan dilaksanakannya fasilitasi SVLK;
2. Belum merasakan manfaat yang signifikan terhadap UMKM yang telah ber S-LK terutama untuk pemasaran domestik sehingga beberapa UMKM yang sudah berS-LK tidak bersedia dilakukan penilikan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Upaya tindak lanjut yang dilakukan diantaranya :

1. Sosialisasi yang intensif ke Pemerintah

Daerah/Instansi terkait dan pelaku usaha tentang implementasi SVLK;

2. Koordinasi dengan LKPP dan Kementerian terkait serta akan ditindaklanjuti dengan memberikan insentif bagi UMKM berupa usulan daftar UMKM yang ber S-LK dalam e-katalog serta pembelian produk UMKM berS-LK untuk promosi.

Indikator Kinerja Kegiatan 3 UMKM yang difasilitasi Sertifikat Penilikan SVLK, pelaksanaan indicator ini didukung oleh 1 (satu) Rincian Ouput (RO) “ Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan” dengan uraian target dan realisasi sebagaimana table dibawah berikut. capaian kegiatan Rincian Output tersebut merupakan capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL). Indikator Kinerja Kegiatan 3 UMKM yang difasilitasi Sertifikat Penilikan SVLK.

Berdasarkan Capaian IKK 3 sebesar 120% dan Realisasi Anggaran sebesar 98,16% maka diperoleh pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,82 sehingga masuk kategori Efisien.

Dukungan Rincian Output pada IKK 3

Uraian	Satuan	RINCIAN OUTPUT			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	(%)	PAGU	Realisasi	(%)
6733.QDG.001							
Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	UMKM	25	52	208%	5.716.372.000	5.610.954.838	98,16

PERHITUNGAN EFISIENSI IKK 3

$$\frac{\%realisasi\ anggaran\ (input)}{\%capaian\ output\ (output)} = \frac{98,16\%}{120\%} = 0,82 \text{ “Efisien”}$$

B. REALISASI ANGGARAN 2023

Direktorat BPPHH Tahun 2023 bertanggung jawab pada Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan, dengan pagu anggaran awal sebesar Rp 14.998.435.000. Pada pertengahan tahun Direktorat BPPHH memperoleh penambahan anggaran sehingga pagu menjadi 15.137.335,000, yang kemudian dibagi ke dalam 6 (enam) output kegiatan.

Realisasi anggaran pada Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan, Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hutan Lestari tahun 2023 sebesar 14.966.619.550 atau 98,87 % dengan rincian per output sebagaimana table disamping..

Apabila dilihat berdasarkan proporsi, alokasi terbesar pada Dit. BPPHH terdapat pada RO Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan sebesar 46,94% dan RO Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan sebesar 37,76%.

Pagu anggaran Dit. BPPHH pada tahun 2023 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan pagu di tahun 2022. Apabila dilihat secara persentase, capaian realisasi anggaran Dit. BPPHH mengalami peningkatan sebesar 0,24% Dimana realisasi pada tahun 2022 sebesar 98,63%. Peningkatan realisasi anggaran disertai dengan upaya optimalisasi/penyesuaian ketersediaan anggaran dengan

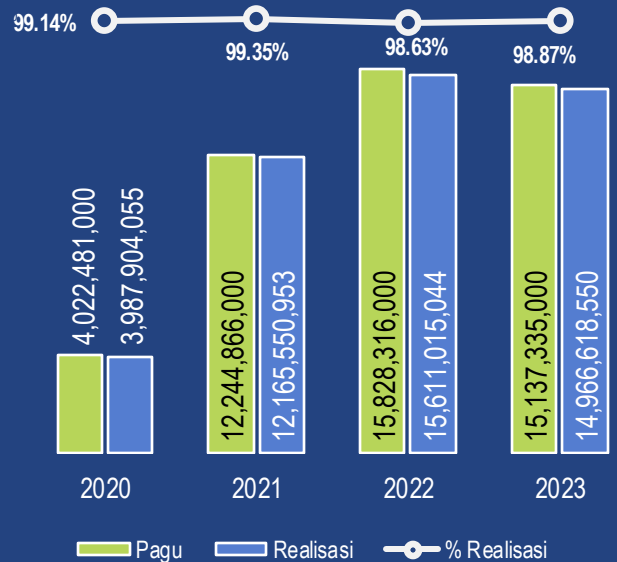
Realisasi Anggaran Dit. BPPHH TA.2023

98,87%

Realisasi Anggaran



Pagu dan Realisasi Anggaran Dit. BPPHH TA.2023



Realisasi anggaran berdasarkan rincian output

Kode Output	Uraian	Pagu	Realisasi	Persen (%)
6733.AFA.001	NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	223.310.000	222.327.176	99,56%
6733.BAC.001	Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	7.105.110.000	7.063.430.440	99,41%
6733.PBV.001	Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan	348.956.000	344.691.510	98,78%
6733.QAH.001	Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	537.168.000	535.680.185	99,75%
6733.QDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	5.716.372.000	5.610.954.838	98,16%
6733.QDB.001	Pembinaan Teknis/Supervisi/Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	1.206.419.000	1.189.535.401	98,60%
Jumlah		15.137.335.000	14.966.619.550	98,87%





C. PERHITUNGAN EFISIENSI

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing perspektif. Semua target kinerja dalam IKK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing IKK disajikan pada table dibawah. Pagu anggaran Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2023 sebesar Rp 15.137.335.000

dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.966.619.550 (98,87%). Dengan rerata capaian kinerja sebesar 108,68%, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,91 (dari perhitungan rasio input dibagi output = $98,87 : 108,68 = 0,91$). Dengan demikian, capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2023 termasuk kategori efisien (nilai efisiensi <1), sebagaimana diilustrasikan pada gambar dibawah berikut.

Tabel Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2023

	Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
Input	Input Awal (Rp)	14.998.435.000		
	Revisi (Rp)	15.137.335.000	14.966.619.550	98,87%
Output	IKK 1 (juta m3)	45,00	45,79	101,76%
	IKK 2 (juta ton)	16,50	17,21	104,30%
	IKK 3 (UMKM)	100,00	136,00	120,00%
	Rerata (%)			108,68%

PERHITUNGAN EFISIENSI

$$\frac{\%realisasi\ anggaran\ (input)}{\%capaian\ output\ (output)} = \frac{98,87\%}{108,68\%} = 0,91$$

“Efisien”



D. CAPAIAN KEGIATAN LAINNYA

1. Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan

Kegiatan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan realisasi produksi kayu olahan sesuai kapasitas izin yang diberikan dan bertujuan untuk terwujudnya kepatuhan PBPHH pada peraturan perundang undangan serta peningkatan kinerja Pengolahan Hasil Hutan.

Direktorat BPPHH telah melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian PBPHH. Berdasarkan hasil penapisan awal evaluasi kinerja PBPHH berdasarkan data administrasi, telah dilakukan klasifikasi kinerja PBPHH ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

1. Terindikasi tidak melakukan kegiatan operasional produksi selama minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut sebanyak 105 unit PBPHH;
2. Melakukan kegiatan produksi < 50 persen sebanyak 226 unit PBPHH;
3. Melakukan kegiatan produksi > 50 persen sebanyak 132 unit PBPHH.

Terhadap PBPHH yang masuk klasifikasi terindikasi tidak melakukan kegiatan operasional produksi selama minimal 3 tahun berturut-turut telah dilaksanakan pemeriksaan lapangan oleh BPHL dan Dinas pada Tahun 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Dirjen PHL sebagai bahan tindak lanjut.

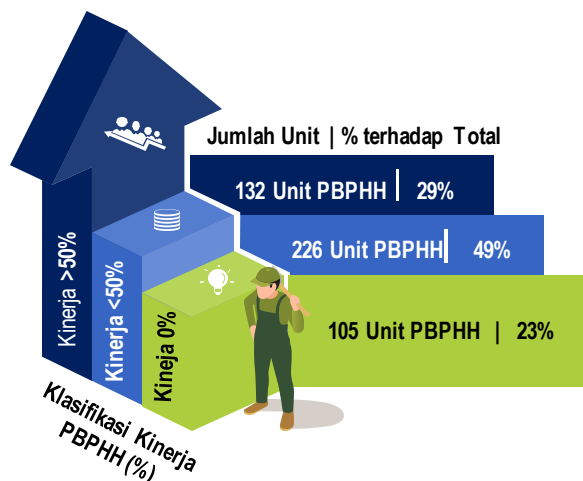
Pada tahun 2023 sebagai tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian PBPHH, saat ini telah terbit 120 pencabutan PBPHH. Hal tersebut sebagai upaya menertibkan pemegang PBPHH dalam melaksanakan kegiatan operasional dilapangan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, upaya rasionalisasi kapasitas terpasang sesuai PBPHH dengan realisasi produksi dan ketersediaan bahan baku akan terus dilakukan telah dilaksanakan.

Terhadap PBPHH yang memiliki kinerja produksi < 50% telah dilakukan bedah kinerja yang melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi, BPHP dan Asosiasi. Bedah kinerja untuk mengetahui kondisi real PBPHH di lapangan dan kendala yang dihadapi guna mencari solusi alternatif meningkatkan kinerja PBPHH

Kegiatan bedah kinerja diharapkan dapat memberikan solusi terbaik untuk peningkatan kinerja PBPHH dan memberikan dampak yang luas terhadap produktifitas PBPHH secara Nasional. Aktifnya PBPHH akan berdampak luas terhadap peningkatan ekonomi Masyarakat utamanya dalam hal peningkatan investasi dan penambahan serapan tenaga kerja.

Klasifikasi Kinerja PBPHH tahun 2023



Jumlah PBPHH yang dilakukan Bedah Kinerja Tahun 2021-2023

Provinsi	Jumlah PBPHH		
	2021	2022	2023
Jambi	-	-	9
Riau	-	-	15
Bengkulu	1	-	-
Banten	1	-	-
Jawa Barat	8	-	-
Jawa Timur	-	8	13
Jawa Tengah	14	12	-
Kalimantan Barat	-	-	7
Kalimantan Timur	-	4	-
Kalimantan Selatan	-	-	14
Papua Barat	-	11	-
Papua	-	12	-
Total	24	47	54

Pada Tahun 2023 bedah kinerja telah dilaksanakan terhadap PBPHH yang memiliki kinerja produksi < 50% yang dilaksanakan yaitu di Jambi sebanyak 9 PBPHH, di Jawa Timur sebanyak 13 PBPHH, di Kalimantan Selatan sebanyak 14 PBPHH, di Kalimantan Barat sebanyak 7 PBPHH dan 15 PBPHH di Provinsi Riau. Jumlah PBPHH yang dilakukan bedah kinerja meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tindaklanjut dari bedah kinerja, PBPHH akan menyusun *action plan* kedepan sebagai bentuk komitmen untuk terus melakukan produksi kayu olahan sesuai dengan kapasitas yang sudah diberikan dalam izin.

Apabila dalam jangka waktu tertentu, PBPHH yang memiliki kinerja <30% tidak memberikan tindaklanjut pasca Bedah kinerja, akan diberikan berupa Surat Teguran tertulis sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian Direktorat BPPHH terhadap izin yang telah diberikan.



2. Sosialisasi UMKM Bersama Anggota DPR

Pada tahun 2023, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan melaksanakan kegiatan Sosialisasi SVLK Bagi UMKM dengan melibatkan Anggota Komisi IV DPR-RI. Sosialisasi SVLK Bagi UMKM tersebut dihadiri sekitar 100 orang pelaku usaha baik dari UMKM Kehutanan maupun Petani Hutan.

Tujuan dari kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemahaman SVLK terutama pada tingkat UMKM sehingga dapat meningkatkan daya saing produk per kayu Indonesia, sekaligus menyampaikan kegiatan fasilitasi/ pembiayaan SVLK dan penerbitan dokumen ekspor bagi UMKM.

Output yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya daya saing UMKM terutama untuk pemasaran ekspor sehingga

dapat meningkatkan nilai ekspor produk hasil kayu olahan di Indonesia. Tercatat sosialisasi UMKM yang melibatkan anggota DPR terlaksana sebanyak 54 kali yang tersebar di 13 Provinsi.

Kegiatan sosialisasi UMKM bersama anggota DPR ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2022 pada tahun 2022 kegiatan ini sebanyak 45 kali di 12 Provinsi. Lokasi dan jumlah pelaksanaan sosialisasi UMKM meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya menandakan antusiasme peserta UMKM untuk dapat memiliki SVLK dan meningkatnya kesadaran UMKM akan pentingnya legalitas produk hasil hutan .

Lokasi Sosialisasi SVLK bagi UMKM Bersama Anggota Komisi IV DPR RI







BAB IV

PENUTUP

Capaian IKK Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan pada Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan pada tahun 2023, sebagai berikut :

- a. Capaian volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu sebanyak 49,55 juta m³, atau 106,38% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2023 sebanyak 45 juta m³.
- b. Capaian Volume ekspor produk olahan hasil hutan sebanyak 17,21 juta ton atau 104,30% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2023 sebanyak 16,5 juta ton.
- c. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK sebanyak 136 UMKM, atau 120% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2023 sebanyak 100 Kelompok UMKM.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2023 menunjukkan bahwa secara keseluruhan target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja dan IKK, dapat tercapai dengan baik dan terdapat capaian yang melebihi target yang ditetapkan. Pagu anggaran akhir

kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2022 sebesar Rp 15.828.316.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.966.619.550 (98,87%). Dengan capaian kinerja sebesar 108,86%, maka pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya input dan output sebesar 0,91 atau efisien.

Melihat hasil pencapaian kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun Anggaran 2023 maka untuk peningkatan kinerja kegiatan beberapa saran yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Mencermati tren perubahan capaian output seiring dengan dinamisnya permintaan pasar terhadap produk hasil hutan dan perlunya pengembangan *intelligence market*.
2. Meningkatkan koordinasi internal maupun dengan instansi terkait dan para pihak dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.



Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan